



## Keterbukaan Publik dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Mewujudkan Sekolah Bebas dari Korupsi di SDN 3 Cendi Manik

**1\*Alifha Asna Pratiwi, Mohamad Mustari, Mansur Hakim, Fahruddin, Abdul Kadir Jaelani**

11Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Pascasarjana, Universitas Mataram, Jl. Pemuda No. 59 A, Mataram, Indonesia 83125

\*Correspondence e-mail: [alifhapratiwi@gmail.com](mailto:alifhapratiwi@gmail.com)

Diterima: Mei Tahun; 2025 Revisi: Mei Tahun; 2025 Diterbitkan: Juni 2025

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterbukaan publik dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 3 Cendi Manik sebagai strategi menciptakan sekolah yang bebas dari korupsi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi telah diterapkan melalui pelaporan keuangan terbuka, forum musyawarah, serta pemasangan papan informasi. Akuntabilitas tercermin dalam pelaporan daring berbasis ARKAS dan tindak lanjut terhadap temuan audit. Partisipasi publik ditunjukkan melalui keterlibatan komite sekolah dalam perencanaan dan evaluasi anggaran. Namun, masih terdapat tantangan seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan belum optimalnya sistem pengelolaan umpan balik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterbukaan publik memiliki peran strategis dalam mencegah korupsi, namun memerlukan dukungan sistemik dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi sekolah dasar lainnya dalam memperkuat tata kelola keuangan yang partisipatif dan transparan.

**Kata Kunci:** Keterbukaan Publik, Dana BOS, Transparansi, Akuntabilitas, Sekolah Bebas Korupsi

### ***Public Transparency in the Management of School Operational Assistance (BOS) Funds to Establish a Corruption-Free School at SDN 3 Cendi Manik***

### *Abstract*

*This study aims to describe public transparency in the management of School Operational Assistance (BOS) funds at SDN 3 Cendi Manik as a strategy to build a corruption-free school. A qualitative approach with a case study method was employed. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The findings indicate that transparency was implemented through open financial reporting, community meetings, and public information boards. Accountability was demonstrated via online reporting using the ARKAS system and follow-up actions on audit findings. Public participation was evident through the involvement of the school committee in budget planning and evaluation. However, challenges persist, such as low digital literacy among parents, limited technological infrastructure, and the absence of a structured feedback system. This research concludes that public transparency plays a strategic role in preventing corruption but requires systemic and collaborative support from all stakeholders. The findings are expected to serve as a reference for other elementary schools in strengthening participatory and transparent financial governance.*

**Keywords:** *Public Transparency, BOS Funds, Transparency, Accountability, Corruption-Free School*

**How to Cite:** Pratiwi, A. A., Mustari, M., Hakim, M., Fahruddin, F., & Jaelani, A. K. (2025). Keterbukaan Publik dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Mewujudkan Sekolah Bebas dari Korupsi di SDN 3 Cendi Manik. *Reflection Journal*, 5(1), 348–359. <https://doi.org/10.36312/rj.v5i1.2974>



<https://doi.org/10.36312/sasambo.vxix.fff>

Copyright© 2025, Pratiwi et al

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



### PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran fundamental dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, yang pada akhirnya menjadi pilar utama pembangunan nasional. Untuk memperkuat akses dan kualitas pendidikan dasar, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak tahun 2005. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya operasional sekolah sehingga setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Merujuk pada Permendikbud RI Nomor 19 Tahun 2020, dana BOS diberikan secara berkala untuk mendukung operasionalisasi seluruh kegiatan pendidikan di sekolah.

Namun, idealisme yang mendasari program BOS hanya dapat diwujudkan apabila pengelolaan dana tersebut dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Transparansi dalam pengelolaan dana publik merupakan prasyarat utama guna memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan tujuan pendidikan. Mulyasa (2012) menegaskan bahwa tata kelola dana pendidikan yang profesional, transparan, dan akuntabel menjadi kunci untuk optimalisasi pemanfaatan dana pendidikan. Dalam praktiknya, transparansi bukan hanya sekadar keterbukaan informasi, melainkan mencakup pelibatan masyarakat, ketersediaan akses terhadap data keuangan, serta komunikasi yang jelas dan sistematis.

Berbagai studi empiris di kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola yang baik (good governance), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, memiliki korelasi langsung dengan performa sistem pendidikan publik (Government at a Glance Southeast Asia 2019, 2019). Dalam konteks Indonesia, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana BOS telah menjadi sorotan utama, mengingat kuatnya harapan bahwa pengelolaan dana pendidikan di tingkat sekolah dapat dilakukan secara inklusif dan berbasis kebutuhan lokal.

Sayangnya, gap antara regulasi dan implementasi di lapangan masih cukup besar. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan sekolah tidak selalu mudah diakses, kurang mutakhir, atau disusun tanpa pelibatan komite sekolah secara optimal (Lituhayu et al., 2023). Selain itu, transparansi keuangan juga erat kaitannya dengan praktik akuntabilitas yang mampu meminimalisasi potensi korupsi. Dalam konteks ini, transparansi memainkan peran strategis sebagai bentuk kontrol sosial yang menekan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Penelitian oleh Wirawan (2022) menyoroti pentingnya digitalisasi dalam mendukung transparansi pengelolaan dana BOS. Penggunaan aplikasi seperti RKAS daring dan integrasi data dalam Rapor Pendidikan dinilai dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi laporan keuangan. Namun, tantangan lain muncul dari keterbatasan literasi digital, infrastruktur teknologi yang belum merata, serta kapasitas manajerial sekolah dalam mengelola aplikasi tersebut.

Kompleksitas lain yang muncul berkaitan dengan kesenjangan antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal. Azizuddin (2020) mencatat bahwa dalam praktiknya, desentralisasi pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya disertai dengan kapasitas kelembagaan yang memadai di tingkat sekolah. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas pelaporan, minimnya partisipasi publik, dan lambannya respon terhadap temuan audit atau pengaduan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah telah menunjukkan komitmennya melalui program Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) yang digagas oleh Kementerian PANRB pada tahun 2014. Program ini tidak hanya menekankan integritas dalam birokrasi, tetapi juga mengedepankan prinsip transparansi dan partisipasi dalam semua lini layanan publik, termasuk pendidikan. Inisiatif ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem tata kelola yang terbuka, responsif, dan partisipatif.

Studi dari Juwita (2023) juga menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah dasar sebagai bagian dari upaya preventif. Ketika nilai-nilai integritas ditanamkan sejak dini, diharapkan manajemen keuangan sekolah tidak hanya mengandalkan sistem formal, tetapi juga didukung oleh etos budaya organisasi yang kuat.

Temuan awal dari observasi di SDN 3 Cendi Manik menunjukkan adanya sejumlah inisiatif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui penggunaan sistem digital seperti RKAS daring dan Rapor Pendidikan. Sistem ini membuka peluang untuk monitoring berbasis data yang lebih kuat dan partisipatif. Namun, tantangan tetap ada. Penunjukan bendahara dari kalangan guru yang tidak memiliki latar belakang akuntansi menyebabkan seringnya terjadi kesalahan administratif. Selain itu, sistem pelaporan yang masih mengandalkan format Excel offline kerap bermasalah dalam hal sinkronisasi dan keamanan data.

Rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan serius. Banyak orang tua siswa yang enggan menghadiri rapat karena keterbatasan waktu dan literasi kebijakan. Mereka tidak memahami secara utuh hak dan kewajiban dalam mengawasi penggunaan dana publik, sehingga kontrol sosial menjadi lemah. Situasi ini diperburuk oleh keterbatasan sarana informasi digital di sekolah-sekolah pinggiran, yang mengakibatkan ketimpangan dalam akses informasi.

Dengan melihat kompleksitas tersebut, menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik telah diterapkan dalam pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut melalui studi kasus di SDN 3 Cendi Manik, Kecamatan Sekotong. Penelitian ini menyoroti praktik keterbukaan publik dalam pengelolaan dana BOS, kendala yang dihadapi, serta strategi yang dilakukan untuk mencegah penyimpangan.

Lebih jauh, penelitian ini juga ingin mengisi kekosongan empiris dalam studi mengenai implementasi prinsip *good governance* dalam konteks pengelolaan dana pendidikan dasar. Berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung deskriptif atau fokus pada aspek teknis pelaporan, penelitian ini mengambil pendekatan integratif dengan melihat transparansi tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai strategi manajemen partisipatif dan antikorupsi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang sistem transparansi yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan bentuk keterbukaan publik yang diterapkan dalam pengelolaan dana BOS di SDN 3 Cendi Manik; (2) Mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat penerapan transparansi dan akuntabilitas; serta (3) Merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk memperkuat tata kelola dana pendidikan yang bersih dan partisipatif. Harapannya, temuan dari studi ini dapat dijadikan rujukan bagi sekolah dasar lainnya yang memiliki karakteristik sosial dan tantangan serupa dalam mewujudkan tata kelola yang berintegritas.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Wahidmurni (2017) metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, penggalian dokumen. Pendekatan studi kasus dipilih agar penelitian lebih berfokus dengan satu objek penelitian sehingga dapat mengungkap, apa yang sebenarnya terjadi. Berkaitan dengan pendekatan ini, Mustari dan Rahman (2012) menjelaskan bahwa studi kasus adalah salah satu strategi dan metode analisis data kualitatif yang menekankan pada kasus-kasus khusus yang terjadi pada objek analisis.

Penelitian berfokus pada SDN 3 Cendi Manik di Kecamatan Sekotong, dengan tujuan memungkinkan eksplorasi mendalam tentang praktik keterbukaan publik dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu, metode ini dapat memberi gambaran tantangan yang dihadapi dalam menerapkan keterbukaan dalam pengelolaan dana untuk mewujudkan sekolah bebas dari korupsi. Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Sekolah dan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai penanggung jawab serta tokoh yang berperan aktif dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sedangkan Informan dalam penelitian ini yaitu Komite Sekolah dan Guru di SDN 3 Cendi Manik, sebagai penerima manfaat langsung dan pemantau pasif dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan 3 tahapan sesuai dengan yang digambarkan Miles dan Huberman (2014) yaitu:

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data mentah yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan sejak awal proses pengumpulan data, dengan cara: (a) memilah dan mengelompokkan data berdasarkan fokus penelitian; (b) mengorganisasi data berdasarkan narasumber (kepala sekolah, bendahara Sekolah, guru, dan komite sekolah) serta sumber data (hasil wawancara, catatan observasi, dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), laporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)); (c) mengidentifikasi pernyataan yang relevan dan bermakna, serta menghilangkan informasi yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan penelitian. Reduksi data ini

dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian agar data yang dianalisis benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan cara menyusun data yang telah direduksi ke dalam format yang sistematis dan mudah dipahami, agar memungkinkan penarikan kesimpulan secara logis. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk: (a) narasi deskriptif berdasarkan tema dan sub-tema yang telah dikembangkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi; (b) tabel tematik yang menyajikan kategori temuan berdasarkan indikator keterbukaan publik, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan sekolah bebas dari korupsi; (c) kutipan langsung dari narasumber yang relevan untuk mendukung interpretasi data dan meningkatkan validitas temuan. Penyajian data ini bertujuan untuk menggambarkan secara utuh keterbukaan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta dampaknya terhadap pencegahan korupsi di lingkungan sekolah.

## 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menyusun pola-pola hubungan dan keterkaitan antar data, yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam tahap ini, peneliti: (a) menganalisis keterkaitan antara keterbukaan informasi dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (b) mengkaji peran forum-forum diskusi, transparansi laporan, dan partisipasi komite sekolah dalam mencegah praktik penyimpangan atau penyalahgunaan dana; (c) mengidentifikasi kendala penerapan keterbukaan, seperti keterbatasan sarana informasi digital, rendahnya literasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan, dan kesenjangan komunikasi antara sekolah dan publik. Verifikasi dilakukan secara berkelanjutan melalui triangulasi sumber data (wawancara, observasi, dokumentasi), sehingga kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Proses ini juga memastikan bahwa setiap temuan dan interpretasi data bersifat valid, dapat diuji kembali, dan sesuai dengan realitas di lapangan.

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik validitas yang dikembangkan oleh Lincoln dan Guba (1985), yang mencakup empat kriteria, yaitu: kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

### 1. Kredibilitas

Kredibilitas data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi metode, yaitu dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang valid. Salah satu tema dapat menjadi contoh yaitu informasi tentang mekanisme keterbukaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diperoleh dari wawancara kepala sekolah, diverifikasi melalui observasi papan informasi, serta dikuatkan melalui dokumentasi SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Temuan seperti partisipasi masyarakat, bentuk laporan keuangan, serta respon terhadap masukan, semuanya ditelaah melalui lintas sumber tersebut. Hasil triangulasi menunjukkan bahwa praktik keterbukaan berjalan, meskipun belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal digitalisasi.

### 2. Transferabilitas

Untuk memastikan transferabilitas, dilakukan dengan cara Thick Description atau memberikan deskripsi terperinci mengenai konteks penelitian, seperti kondisi sekolah, struktur pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan praktik keterbukaan publik. Hal ini memungkinkan pembaca memahami konteks secara mendalam dan menilai relevansi temuan untuk kasus lain. SDN 3 Cendi Manik merupakan sekolah dasar negeri di wilayah pedesaan dengan karakteristik sosial yang dapat ditemukan di banyak sekolah lain di Indonesia. Sistem pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pola pelibatan masyarakat, serta keterbatasan pemanfaatan teknologi menjadikan hasil penelitian ini relevan dan dapat dijadikan rujukan untuk sekolah lain yang memiliki karakteristik serupa.

### 3. Dependabilitas

Dependabilitas dijaga dengan menyusun log penelitian secara sistematis, mencatat setiap langkah yang dilakukan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga analisis. Audit trail

diterapkan dengan mendokumentasikan semua proses penelitian, termasuk transkrip wawancara, catatan observasi, dan laporan hasil analisis.

Seluruh kegiatan tercatat secara kronologis sejak Februari hingga April 2025. Kegiatan melibatkan sembilan narasumber dan disertai bukti dokumen seperti transkrip wawancara, hasil observasi, dan salinan dokumen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini memungkinkan proses penelitian ditelusuri dan diuji ulang oleh peneliti lain jika diperlukan.

#### 4. Konfirmabilitas

Peneliti menjaga konfirmabilitas dengan menghindari bias pribadi dalam interpretasi data. Data yang diperoleh didasarkan pada fakta yang dikumpulkan dari narasumber dan dokumen, bukan opini peneliti. Pada penelitian ini konfirmabilitas dilakukan melalui member Checking untuk memastikan bahwa temuan penelitian sudah sesuai dengan pengalaman mereka.

Teknik member checking, dilakukan dengan cara kutipan dan ringkasan wawancara periksa kembali oleh masing-masing narasumber untuk diverifikasi. Semua narasumber menyatakan bahwa isi kutipan telah sesuai dengan apa yang mereka sampaikan dalam wawancara. Pernyataan persetujuan ini terdokumentasi secara tertulis

## HASIL DAN DISKUSI

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui triangulasi tiga teknik, yakni observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi administratif yang dikaji secara kontekstual berdasarkan fokus penelitian. Pendekatan analisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014), yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara simultan. Penyusunan temuan disajikan berdasarkan tiga tema utama, yaitu: (A) Implementasi keterbukaan publik dalam pengelolaan Dana BOS, (B) Relevansi keterbukaan publik dengan upaya pencegahan korupsi di sekolah, dan (C) Kendala dalam penerapan keterbukaan publik di sekolah dasar.

### A. Keterbukaan Publik dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Permendikbud No. 6 Tahun 2021, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip dasar dalam pengelolaan Dana BOS. Berdasarkan hasil penelitian, SDN 3 Cendi Manik telah berupaya menerapkan prinsip tersebut dalam praktik pengelolaan keuangannya. Penjabaran lebih rinci terhadap indikator utama keterbukaan publik adalah sebagai berikut.

#### 1. Transparansi sebagai Pilar Keterbukaan

Transparansi informasi keuangan sekolah merupakan fondasi utama untuk memastikan pengawasan publik yang efektif. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sekolah menyampaikan informasi keuangan secara terbuka melalui dua saluran utama: forum rapat dengan komite dan orang tua siswa, serta pemasangan papan informasi BOS di area strategis sekolah. Seperti dijelaskan dalam Tabel 1. Papan pengumuman diperbarui rata-rata dua kali per semester, namun terdapat keterlambatan pembaruan pada triwulan ketiga karena kendala teknis.

**Tabel 1.** Media dan Frekuensi Informasi BOS kepada Publik

Media Informasi	Frekuensi Pembaruan	Keterangan
Papan Informasi Sekolah	2 kali per semester	Sering terlambat diperbarui
Rapat Komite dan Orang Tua	1 kali per semester	Diikuti sebagian besar komite

Meskipun informasi tersedia, masih terdapat kelemahan dalam kontinuitas pembaruan. Hal ini selaras dengan temuan Mubaroq (2020), yang menyatakan bahwa transparansi tidak cukup hanya bersifat deklaratif tetapi juga harus aktual dan mudah dipahami. Selain papan informasi, publik juga dapat mengakses dokumen cetak (RKAS dan SPJ) langsung melalui kepala sekolah atau bendahara, yang menunjukkan bahwa transparansi telah diimplementasikan secara praktis, meskipun belum terfasilitasi secara digital.

Sebagaimana dikonfirmasi oleh guru dan komite sekolah, kegiatan sosialisasi RKAS yang dilakukan di awal tahun anggaran telah melibatkan masyarakat sekitar secara aktif. Ini sejalan dengan prinsip partisipasi dalam kebijakan anggaran berbasis masyarakat (Araújo & Romero, 2016).

## 2. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS

SDN 3 Cendi Manik menunjukkan pelaksanaan akuntabilitas secara menyeluruh. Berdasarkan dokumentasi yang ditelaah, proses pelaporan mencakup: (a) penyusunan laporan penggunaan dana; (b) pelaporan melalui ARKAS secara daring; dan (c) verifikasi oleh tim pendamping BOS kecamatan. Seperti ditunjukkan dalam Tabel 2. Seluruh laporan diajukan tepat waktu dalam tiga siklus pelaporan tahunan.

**Tabel 2.** Jenis dan Waktu Laporan Keuangan BOS Tahun 2024

Jenis Laporan	Waktu Pelaporan	Status
RKAS	Januari 2024	Sudah diverifikasi
Realisasi Dana Triwulan I	April 2024	Dilaporkan melalui ARKAS
Realisasi Dana Triwulan II	Juli 2024	Sedang disusun

Ketika auditor dari BPK menemukan adanya kekurangan pembayaran pajak konsumsi, pihak sekolah merespons dengan cepat melakukan pelunasan, yang mencerminkan komitmen terhadap pelaporan yang dapat diaudit, sebagaimana ditegaskan oleh Mardiasmo (2018) dan Transparency International (2015). Selain itu, dokumentasi pendukung seperti bukti transaksi, kuitansi, dan SPJ tersimpan rapi dan dapat diakses publik. Temuan ini memperkuat posisi sekolah sebagai lembaga publik yang taat terhadap prinsip good governance, sebagaimana disarankan oleh Šwirska (2016) dalam konteks manajemen keuangan sektor pendidikan publik.

## 3. Partisipasi Publik yang Bermakna

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan Dana BOS menjadi indikator utama partisipasi yang bermakna. Berdasarkan observasi dan wawancara, komite sekolah berperan aktif dalam forum penyusunan RKAS dan evaluasi anggaran tahunan. Proses ini mencerminkan model partisipasi deliberatif (Bishop & Davis dalam Mahmudah & Imelda, 2021) yang mengedepankan musyawarah dan representasi. Sebagaimana dirinci dalam Tabel 3 ("Aktivitas Partisipasi Masyarakat dalam Siklus BOS"), bentuk partisipasi meliputi: forum RKAS, penyampaian saran melalui kotak aspirasi, dan keterlibatan informal melalui diskusi dengan guru dan kepala sekolah. Forum rapat tahunan dan semesteran menjadi kanal penting penyampaian masukan, walaupun tingkat kehadiran masyarakat cenderung fluktuatif.

**Tabel 3.** Aktivitas Partisipasi Masyarakat dalam Siklus BOS

Jenis Kegiatan	Partisipan	Bentuk Keterlibatan
Forum Penyusunan RKAS	Komite dan Guru	Diskusi dan pengambilan keputusan
Rapat Evaluasi Semester	Orang Tua & Komite	Memberi masukan dan umpan balik

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat menganggap keterbukaan sekolah sudah baik, meskipun masih ada kebutuhan untuk sosialisasi lanjutan dan peningkatan pemahaman terhadap struktur dan terminologi keuangan. Temuan ini selaras dengan pendapat Putri (2023), yang menyatakan bahwa partisipasi aktif dalam pengelolaan dana hanya bisa diwujudkan apabila terdapat pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang berjalan.

## B. Keterbukaan Publik sebagai Instrumen Pencegahan Korupsi di Lingkungan Sekolah

Penerapan keterbukaan publik dalam pengelolaan Dana BOS di SDN 3 Cendi Manik tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari strategi integritas kelembagaan. Prinsip keterbukaan telah menjadi fondasi dalam mencegah penyalahgunaan wewenang serta memperkuat akuntabilitas publik.

### 1. Transparansi sebagai Strategi Pencegahan

Akses informasi yang terbuka kepada publik merupakan instrumen pengawasan sosial yang efektif. Masyarakat dapat mengakses informasi melalui papan pengumuman, rapat periodik, dan dokumen cetak. Meskipun belum didukung sepenuhnya oleh media digital, langkah ini sudah mendekati model open government yang direkomendasikan oleh OECD (2020).

Temuan ini selaras dengan penelitian Bohari dan Asrin (2024), yang menekankan bahwa pelibatan masyarakat dalam publikasi laporan keuangan terbukti menurunkan risiko korupsi. Keterlibatan ini berfungsi sebagai bentuk tekanan sosial terhadap potensi manipulasi atau penyimpangan. Keberadaan akses data keuangan mendorong perubahan persepsi masyarakat yang sebelumnya pasif menjadi lebih sadar terhadap haknya untuk mengetahui dan mengawasi anggaran publik. Konsep ini didukung oleh Sopanah (2015), yang menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan hanya dapat dibangun melalui keterbukaan dan kesediaan untuk diaudit.

## 2. Akuntabilitas sebagai Wujud Tanggung Jawab

Akuntabilitas di SDN 3 Cendi Manik tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif. Setiap tahapan penggunaan dana dikaitkan dengan bukti fisik dan pelaporan digital melalui ARKAS. Menurut informan dari komite sekolah, mereka memperoleh salinan realisasi anggaran sebagai bentuk transparansi. Pelaporan disusun mengikuti petunjuk teknis dari Kemendikbud dan diawasi oleh pendamping BOS di tingkat kabupaten.

Temuan ini diperkuat oleh teori Handoko (2022) bahwa akuntabilitas merupakan tanggung jawab legal dan moral. Ketika pada tahun 2024 sekolah menghadapi temuan audit terkait kekurangan bayar pajak konsumsi daerah, tanggapan cepat dari pihak sekolah menunjukkan kesadaran tinggi terhadap prinsip-prinsip pertanggungjawaban. Dokumen pelaporan di SDN 3 Cendi Manik juga memuat rincian realisasi kegiatan berdasarkan output dan outcome, bukan sekadar pengeluaran nominal. Ini menunjukkan kecenderungan pengelolaan keuangan yang berorientasi hasil, sebagaimana ditekankan dalam pendekatan kinerja sektor publik oleh Świriska (2016).

## 3. Partisipasi Masyarakat sebagai Mekanisme Kontrol Horizontal

Keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan dan pengawasan RKAS menjadi instrumen penting pengendalian sosial. Seperti dijelaskan dalam Tabel 4 ("Peran Komite Sekolah dalam Proses Penganggaran dan Evaluasi BOS"), komite tidak hanya hadir sebagai simbol keterlibatan, tetapi juga memberikan masukan terhadap prioritas kegiatan dan penyesuaian anggaran.

**Tabel 4.** Peran Komite Sekolah dalam Proses Penganggaran dan Evaluasi BOS

Tahapan BOS	Peran Komite
Perencanaan	Memberi masukan RKAS
Pelaksanaan	Monitoring kegiatan
Evaluasi	Memberi saran perbaikan

Model ini memperkuat gagasan Darin et al. (2022) yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai hak dan bentuk tanggung jawab warga negara. Dalam konteks SDN 3 Cendi Manik, partisipasi masyarakat bahkan diperluas dalam bentuk penyampaian kritik dan pengaduan melalui kotak saran yang ditindaklanjuti secara berkala oleh pihak sekolah.

Pengelolaan saluran pengaduan internal yang terbuka ini memperlihatkan bahwa sekolah telah menerapkan pendekatan anti-fraud seperti yang dijelaskan oleh Jeandry dan Mokoginta (2023). Menurut laporan dokumentasi internal sekolah, terdapat setidaknya 8 masukan yang diterima selama tahun anggaran 2024, 75% di antaranya ditindaklanjuti dalam bentuk penyesuaian RKAS dan strategi sosialisasi.

## 4. Teknologi dan Digitalisasi sebagai Dukungan Sistemik

Penggunaan ARKAS dan integrasi dengan Rapor Pendidikan Satuan Pendidikan merupakan langkah maju menuju sistem pelaporan berbasis data. Menurut informan dari bendahara sekolah, digitalisasi ini membantu menyederhanakan proses penginputan dan pengawasan internal.

Kendati masyarakat belum dapat mengakses langsung aplikasi tersebut, keberadaan sistem ini memperlihatkan potensi efisiensi dan akurasi pelaporan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Suwarno dan Musafik (2022) serta Lituhayu et al. (2023) yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mencegah korupsi melalui pelaporan yang tidak dapat dimanipulasi secara manual.

Namun, belum tersedianya portal publik seperti situs web sekolah menjadi tantangan tersendiri. Seperti ditekankan dalam analisis Araújo & Romero (2016), keterbukaan informasi digital harus memperhatikan keterjangkauan media oleh masyarakat agar tidak menciptakan eksklusivitas informasi.

### C. Kendala dalam Menerapkan Keterbukaan Publik

Meskipun SDN 3 Cendi Manik telah menunjukkan inisiatif positif dalam menerapkan prinsip keterbukaan, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala signifikan yang menghambat optimalisasi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana BOS. Identifikasi kendala ini penting sebagai dasar formulasi kebijakan perbaikan sistemik.

#### 1. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi sekolah adalah rendahnya tingkat kehadiran dan keterlibatan orang tua dalam forum publik. Tabel 5. Menunjukkan bahwa kehadiran orang tua tidak pernah melebihi 40% dari total undangan dalam dua tahun terakhir.

**Tabel 5.** Tingkat Partisipasi Wali Murid dalam Forum Sekolah

Tahun	Undangan Dikirim	Hadir (jumlah)	Persentase Kehadiran
2023	100	38	38%
2024	100	40	40%

Alasan utamanya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme Dana BOS dan peran mereka sebagai pengawas publik. Fenomena ini didukung oleh temuan Indah & Hariyanti (2018), yang menyebutkan bahwa efektivitas transparansi bergantung pada kesiapan masyarakat dalam memahami informasi. Wawancara dengan kepala sekolah dan guru juga menunjukkan bahwa persepsi masyarakat yang menganggap pengelolaan dana adalah urusan internal sekolah menghambat munculnya inisiatif kontrol sosial.

#### 2. Keterbatasan dalam Pemanfaatan Teknologi

Keterbatasan infrastruktur digital menjadi penghambat besar dalam perluasan transparansi. Sekolah belum memiliki laman resmi atau media sosial yang aktif untuk publikasi anggaran dan pelaporan. Pelaporan daring melalui ARKAS hanya bersifat internal dan belum menyediakan interface publik.

Masalah ini mencerminkan temuan Kristianten (dalam Purwanti, 2021), bahwa keterbukaan informasi publik tidak cukup dengan memiliki sistem pelaporan internal, tetapi harus didukung dengan kanal komunikasi publik yang mudah diakses. Tabel 6. Menunjukkan bahwa sekolah hanya memiliki dua unit komputer dan jaringan internet yang tidak stabil.

**Tabel 6.** Fasilitas Teknologi Informasi yang Dimiliki Sekolah

Fasilitas	Jumlah	Kondisi
Komputer/PC	2 unit	Layak pakai
Jaringan Internet	Tidak stabil	Lemah
Website Sekolah	Tidak tersedia	–

Tabel 6 menggambarkan kondisi fasilitas teknologi informasi yang tersedia di sekolah. Saat ini, sekolah memiliki dua unit komputer/PC yang masih dalam kondisi layak pakai. Namun, jaringan internet di sekolah tergolong tidak stabil dan lemah, sehingga dapat menghambat akses informasi dan pembelajaran digital. Selain itu, sekolah belum memiliki website resmi sebagai media informasi daring. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan sarana teknologi informasi untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif, efisien, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat dan orang tua siswa secara lebih luas dan cepat.

#### 3. Literasi Digital yang Rendah

Literasi digital masyarakat juga menjadi hambatan struktural yang signifikan. Berdasarkan wawancara dengan komite sekolah, mayoritas wali murid belum terbiasa menggunakan platform digital untuk mengakses atau membaca laporan keuangan. Banyak istilah teknis dalam dokumen RKAS yang tidak dimengerti, seperti "belanja barang operasional" atau "komponen BOS kinerja".

Temuan ini konsisten dengan laporan dari Natision et al. (2022) dan Mardiasmo (2018), yang menekankan bahwa pengawasan publik yang efektif menuntut adanya hubungan timbal balik antara

penyedia layanan dan penerima manfaat. Tanpa pemahaman yang memadai, keterbukaan informasi cenderung menjadi formalitas tanpa makna.

#### 4. Hambatan Infrastruktur

Letak geografis yang berada di wilayah semi-pedesaan menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah, khususnya dalam hal pemanfaatan teknologi. Keterbatasan koneksi internet yang tidak stabil serta minimnya perangkat keras menghambat proses digitalisasi. Seperti yang diungkapkan oleh Robbins dan Judge (2018), kemampuan institusi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan digital merupakan bagian penting dari kompetensi organisasi masa kini. Namun, dalam praktiknya, SDN 3 Cendi Manik masih sangat bergantung pada sarana konvensional seperti papan informasi fisik dan dokumen cetak untuk menyampaikan informasi kepada publik. Ketergantungan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara semangat atau keinginan untuk menerapkan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi dengan kemampuan teknis yang dimiliki oleh sekolah. Akibatnya, upaya untuk mendorong keterlibatan masyarakat yang berbasis teknologi menjadi terhambat. Ketidakseimbangan ini tidak hanya membatasi arus informasi, tetapi juga menghambat perluasan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan seperti orang tua, komite sekolah, dan masyarakat luas dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas teknologi informasi menjadi langkah strategis untuk mendukung tata kelola sekolah yang lebih partisipatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

#### 5. Pengelolaan Umpam Balik Belum Terstruktur

Sekolah telah menyediakan kotak saran sebagai sarana pengaduan, namun belum memiliki SOP (*Standard Operating Procedure*) tertulis untuk mengatur penerimaan, pencatatan, dan tindak lanjut pengaduan. Akibatnya, tidak semua masukan terdokumentasi dan ditindaklanjuti secara sistematis. Hal ini sejalan dengan analisis Sedarmayanti (2017), yang menekankan pentingnya pencatatan akuntabel dalam media pertanggungjawaban publik.

**Tabel 7. Daftar Pengaduan Masyarakat dan Tindak Lanjut**

No	Substansi Aduan	Tindak Lanjut	Status
1	Alokasi dana ATK tidak jelas	Diperjelas di rapat	Selesai
2	Jadwal pengadaan tertunda	Penyesuaian jadwal	Selesai
3	Tidak ada laporan cetak	Disiapkan salinan fisik	Selesai
4	Kurangnya info via digital	Belum ditindaklanjuti	Belum Selesai

Tabel 7 menyajikan rangkuman pengaduan masyarakat yang diterima oleh pihak sekolah serta langkah tindak lanjut yang telah diambil. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi publik dalam pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program sekolah, termasuk pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan adanya mekanisme pengaduan ini, diharapkan tercipta sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi para pemangku kepentingan.

Terdapat empat pengaduan utama yang tercatat dalam tabel tersebut. Pertama, pengaduan terkait alokasi dana alat tulis kantor (ATK) yang dianggap tidak jelas. Menanggapi hal ini, pihak sekolah melakukan klarifikasi melalui forum rapat bersama yang melibatkan komite sekolah, sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara terbuka dan akuntabel. Status dari pengaduan ini dinyatakan selesai.

Kedua, adanya keterlambatan dalam jadwal pengadaan barang yang sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua dan komite sekolah. Sekolah menindaklanjutinya dengan melakukan penyesuaian jadwal pengadaan sesuai kondisi riil di lapangan. Tindak lanjut ini menunjukkan fleksibilitas dalam perencanaan serta upaya menjaga kelancaran proses pengadaan. Pengaduan ini pun dinyatakan selesai.

Ketiga, masyarakat mengeluhkan tidak tersedianya laporan dalam bentuk cetak yang bisa diakses secara langsung. Menyikapi hal tersebut, pihak sekolah kemudian menyiapkan salinan fisik dari laporan yang diperlukan, sehingga masyarakat dapat mengecek dan membaca laporan secara langsung. Respons ini menunjukkan kesadaran sekolah terhadap pentingnya keterbukaan informasi dan dokumentasi. Pengaduan ini juga dinyatakan selesai.

Keempat, terdapat keluhan mengenai minimnya informasi yang disampaikan melalui media digital. Keluhan ini mencerminkan harapan masyarakat agar sekolah dapat memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk menyampaikan informasi penting secara cepat dan luas. Namun, hingga saat ini, aduan tersebut belum ditindaklanjuti secara konkret. Statusnya masih tercatat sebagai "Belum Selesai", menandakan perlunya perhatian lebih lanjut dari pihak sekolah untuk membenahi sistem komunikasi berbasis digital.

Tabel ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengaduan masyarakat telah ditangani dengan baik dan tuntas oleh pihak sekolah. Namun, adanya satu aduan yang belum ditindaklanjuti juga menjadi catatan penting bahwa peningkatan dalam bidang teknologi informasi perlu segera dilakukan agar akses informasi menjadi lebih merata dan partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan secara menyeluruh. Keterbukaan publik di SDN 3 Cendi Manik telah berjalan pada tiga indikator utama: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Namun, upaya tersebut masih menghadapi kendala dalam aspek literasi digital, infrastruktur, partisipasi masyarakat, dan kelembagaan pengelolaan umpan balik. Kondisi ini menegaskan bahwa transparansi bukan hanya soal penyediaan data, tetapi juga mencakup kesiapan institusi dan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi tersebut. Oleh karena itu, reformasi kebijakan keterbukaan publik perlu dirancang secara menyeluruh mencakup dimensi teknologis, edukatif, dan institusional. Dengan memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan membangun sistem pengelolaan informasi dan pengaduan yang terdokumentasi, sekolah-sekolah di Indonesia dapat menjadikan keterbukaan publik sebagai budaya organisasi, bukan sekadar kewajiban administratif.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan publik dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 3 Cendi Manik telah dijalankan melalui tiga pilar utama tata kelola yang baik: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Ketiga prinsip ini telah terintegrasi dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pengelolaan keuangan sekolah. Praktik-praktik seperti penyampaian laporan terbuka melalui papan informasi, pelibatan aktif komite sekolah dalam musyawarah RKAS, dan pelaporan berbasis aplikasi ARKAS mencerminkan kemajuan menuju sistem tata kelola yang berintegritas. Transparansi telah diwujudkan melalui penyediaan akses informasi kepada publik, baik dalam bentuk cetak maupun lisan, meskipun masih terdapat tantangan dalam aspek digitalisasi dan pembaruan berkala. Akuntabilitas terbukti melalui pelaporan keuangan yang memenuhi prosedur audit dan dokumentasi yang lengkap, serta adanya respons cepat terhadap temuan audit. Partisipasi publik tercermin dalam keterlibatan masyarakat dalam forum-forum sekolah dan pengelolaan pengaduan, meskipun masih perlu diperkuat dengan prosedur pengelolaan umpan balik yang terdokumentasi. Lebih jauh, keterbukaan publik telah berperan sebagai mekanisme strategis dalam membangun sistem pengelolaan yang bebas dari korupsi. Melalui keterlibatan komunitas, penyediaan saluran pengaduan, serta penggunaan sistem digital, sekolah tidak hanya mencegah praktik penyimpangan, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya organisasi yang transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan prinsip Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK), di mana partisipasi dan integritas menjadi landasan utama tata kelola pendidikan. Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap sejumlah hambatan struktural dan kultural yang menghambat optimalisasi keterbukaan. Beberapa kendala utama meliputi rendahnya partisipasi masyarakat akibat literasi kebijakan dan digital yang terbatas, minimnya infrastruktur teknologi, serta belum tersusunnya sistem umpan balik yang terdokumentasi. Situasi ini menunjukkan bahwa penerapan keterbukaan publik tidak hanya membutuhkan komitmen institusional, tetapi juga kesiapan ekosistem pendukung yang mencakup kapasitas sumber daya manusia dan akses teknologi. Keberhasilan implementasi keterbukaan publik tidak hanya ditentukan oleh kebijakan administratif, tetapi juga oleh kekuatan kolaborasi antar pemangku kepentingan dan dukungan sistemik dari pemerintah daerah. SDN 3 Cendi Manik dapat dijadikan contoh awal praktik baik dalam transparansi pengelolaan dana pendidikan, namun keberlanjutannya dan perluasannya sangat bergantung pada reformasi digitalisasi, pelatihan komunitas, dan penguatan sistem kontrol internal.

## REKOMENDASI

Berdasarkan hasil temuan dan analisis, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Penguatan Infrastruktur Digital Sekolah: Pemerintah daerah disarankan untuk memfasilitasi sekolah dengan perangkat teknologi, akses internet yang stabil, serta platform informasi publik daring seperti website sekolah yang terintegrasi dengan sistem pelaporan BOS.
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Disarankan adanya program pelatihan rutin bagi kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah terkait pengelolaan keuangan, pelaporan digital, serta strategi komunikasi publik agar mereka mampu menjalankan fungsi transparansi secara optimal.
3. Penyusunan SOP Saluran Pengaduan: Sekolah perlu menyusun dan menerapkan prosedur baku untuk pengelolaan pengaduan masyarakat yang mencakup pencatatan, verifikasi, tindak lanjut, dan pelaporan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional.
4. Pengembangan Modul Literasi Digital dan Keuangan Masyarakat: Pemerintah daerah atau lembaga swadaya masyarakat dapat menginisiasi pelatihan singkat kepada wali murid dan masyarakat sekitar mengenai pengawasan keuangan sekolah, agar partisipasi publik menjadi lebih bermakna dan kritis.
5. Integrasi Sistem Pelaporan Publik Terbuka: Kementerian Pendidikan dapat mengembangkan sistem dashboard transparansi yang memungkinkan masyarakat memantau realisasi penggunaan dana BOS secara daring, terstruktur, dan mudah dipahami.

## ACKNOWLEDGMENT

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Sekolah, Bendahara BOS, guru, dan seluruh staf di SDN 3 Cendi Manik yang telah bersedia menjadi responden serta memberikan informasi yang diperlukan. Penulis juga menghargai bimbingan dan masukan dari dosen pembimbing 1, Bapak Mohamad Mustari, M.M., M.A., Ph.D, dan pembimbing 2, Bapak Dr. Mansur Hakim, M.Pd., selama proses penelitian ini berlangsung.

## KONTRIBUSI PENULIS

Konseptualisasi oleh Alifha Asna Pratiwi dengan bimbingan Mohamad Mustari dan Mansur Hakim; pengumpulan dan analisis data serta penulisan draf awal oleh oleh Alifha Asna Pratiwi; peninjauan dan penyuntingan naskah oleh Mohamad Mustari, Mansur Hakim, Fahruddin, dan Abdul Kadir Jaelani. Semua penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir naskah yang diajukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Araújo, J., & Romero, F. (2016). *Local government transparency index: determinants of municipalities' rankings*. *International Journal of Public Sector Management*, 29(4), 327–347. <https://doi.org/10.1108/ijpsm-11-2015-0199>
- Azizuddin, M. (2020). *Administrative reforms in South and Southeast Asia: Enhancing the capacity for public service delivery*. *Southeast Asia a Multidisciplinary Journal*, 20(1), 63–77. <https://doi.org/10.1108/seamj-01-2020-b1006>
- Bohari, B., & Asrin, A. (2024). *Pola Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Lingsar Kabupaten Lombok Barat*. *Jurnal Praktisi Administrasi Pendidikan (JPAP)*, 8(1), 16–20. <https://doi.org/10.29303/jpap.v8i1.569>
- Darin, M. U., & Dai, S. I. S. (2022). *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa*. *OIKOS-NOMOS: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*. <https://doi.org/10.37479/jkeb.v15i1.15599>
- Handoko, T. H. (2022). *Manajemen Kepala Sekolah/Madrasah dalam Sistem Pengelolaan Keuangan*. *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman*, 8(1). <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/annur/article/download/164/142>
- Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya*. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 127–140. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol12.iss2.art3>

- Jeandry, G., & Mokoginta, R. M. (2023). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana BOS (Studi Empiris pada Sekolah Dasar Kota Ternate)*. JTRANS, 9(1). <https://doi.org/10.33387/jtrans.v9i1.4311>
- Juwita, R. (2023). *A human rights-based approach to combating corruption in the education sector in Indonesia*. Asia Pacific Journal on Human Rights and the Law, 24(2), 230–265. <https://doi.org/10.1163/15718158-24020002>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Lituhayu, D., Rahman, A., Muluk, M., & Huda, M. (2023). *Anti-corruption education policy outputs for combatting corruption in Indonesia: Applying the theory of planned behaviour*. Journal of Contemporary Governance and Public Policy, 4(2), 195–214. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v4i2.230>
- Mahmudah, R., & Imelda, J. D. (2021). *Partisipasi Masyarakat dan Kapasitas Kepemimpinan dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta*. JJIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6(2), 163–177. <https://doi.org/10.14710/jjip.v6i2.11179>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mubaroq, A. F. (2020). *Pengaruh Transparansi Anggaran Dana Desa terhadap Public Trust*. Skripsi, Universitas Komputer Indonesia. <http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3738>
- Mustari, M., & Rahman, M. T. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Natision, A., Esien, E., Harjo, D., Agoestiyowati, R., & Lestari, P. (2022). *The effect of public accountability and transparency on state financial management mechanism: A quantitative method analysis*. Ilomata International Journal of Social Science, 3(1), 415–434. <https://doi.org/10.52728/ijss.v3i1.433>
- OECD. (2018). *Fiscal councils' impact on promoting Transparency and Accountability in Public Finance Management*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.3326/pse.44.3.4>
- Putri, S. N. A., dkk. (2023). *Pengaruh Motivasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Proses Pembangunan Desa Sendangrejo Kabupaten Lamongan*. PRAJA Observer, 3(2). <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/1007>
- Purwanti, U. (2021). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim*. JIASK: Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan, 3(2). <https://doi.org/10.48093/jask.v3i2.35>
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2018). *Organizational Behavior* (17th ed.). New York: Pearson Education.
- Sedarmayanti. (2017). *Good Governance: Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Świrska, A. (2016). *Methods for improving the effectiveness of the financial management of local government units in Poland*. Science and Studies of Accounting and Finance Problems and Perspectives, 10(1), 177–185. <https://doi.org/10.15544/ssaf.2016.17>
- Sopanah. (2015). *Menguak Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan APBD*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI). <https://journal.uii.ac.id/JAAI/article/view/2249>
- Suwarno, G., & Musafik, M. N. (2022). *Implementasi Aplikasi RKAS dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus SDN 2 Bantengan dan SDS Muhammadiyah Tulungagung)*. Jurnal Otonomi, 22(2). <https://doi.org/10.32503/otonomi.v22i2.3010>
- Transparency International. (2015). *Corruption Perceptions Index*. Berlin: Transparency International.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS.
- Wahidmurni. (2017). *Pemaparan metode penelitian kualitatif*. <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/2/1984.pdf>